Vol. 4, No. 1, Maret 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Reza Yustiyanto [(1)*]
Email : [(a*)]rezayustiyanto28@gmail.com

A B S T R A K

Tanggungjawab pembangunan desa bukan semata-mata pemerintah saja akan tetapi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pembangunan di desa sangat mempengaruhi bagaimana arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta hambatan dari masyarakat untuk ikut dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan historis serta konseptual. Dari urian diatas penulis ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa? serta apa yang menjadi hambatan dalam partisipasi masyarakat? Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat kita lihat dari 4 tahapan: pertama tahap Assesment, kedua tahap alternatif program atau kegiatan, ketiga pelaksanaan (implementasi), keempat adalah evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Kemudian terkait hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah Tingkat pendidikan masyarakat di pedesaan masih sangat rendah, tingkat komunikasi dari pemerintah ke masyarakat kurang sehingga menyebabkan masyarakat kurang paham apa yang disampaikan, usia, jenis pekerjaan dan tingkat kepemimpinan, tingkat penghasilan dan lamanya tinggal didesa mempunyai hubungan dengan keaktifan atau tingkat partisipasi yang tinggi terkait dengan pembangunan di desa.

Kata kunci: Desa, Partisipasi, Pembangunan

A B S T R A C T

The responsibility for village development is not solely the government's, but the community's. Community participation in planning, implementation and evaluation of development in villages greatly influences the direction of government policy in development. The aim of this research is to find out how the community participates in village development and the barriers to community participation in village development. This research uses normative legal research methods with a statutory approach, historical approach and context. From the explanation above, the author wants to know how community participation is in the village development process? and what are the obstacles to community participation? We can see community participation in village development from 4 stages: the first stage is assessment, the second stage is alternative programs or activities, the third is implementation, the fourth is evaluation of the results achieved. Then the obstacles related to community participation in village development are that the level of education of the community in rural areas is still very low, the level of communication from the government to the community is lacking, causing the community to not understand what is being conveyed, age, type of work and level of leadership, income level and length of stay in the village are related to activeness or a high level of participation related to development in the village.

Keywords: *Village, Participation, Devolopment*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
23.02.2025	25.02.2025	22.03.2025	31.03.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan pemerintah mempunyai lebih banyak wewenang untuk melakukan proses perencanaan dan mekanisme yang dapat memastikan kesinambungan pembangunan pemerintah pusat. Pasal 78 ayat (1) UU No 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa pembangunan desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas desa, kualitas kehidupan manusia dan pengurangan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan fasilitas dan infrastruktur, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungan. Ayat (3)menekankan terkait pentingnya kebersamaan, kekerabatan dan kerjasama partisipasi dalam pembangunan desa untuk mencapai perdamaian sosial dan keadilan.

Keberhasilan dalam pembangunan desa atau kalurahan bukan hanya tanggungjawab pemerintah akan tetapi masyarakat pun ikut bertanggungjawab dalam keberhasilan pembangunan. Arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan perawatan hasil pembangunan desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan desa sebelum adanya aturan terkait partisipasi masyarakat, mengakibatkan kegagalan dalam program pengembangan pemangunan desa. Paradigma politik terkait peran negara dalam kehidupan utara adalah fokus utama dari kebijakan pembangunan desa yang gagal menggabungkan antara aspirasi masyarakat dengan kurangnya tekat yang mengakibatkan tidak adanya keberlanjutan pembangunan.

Menurut beberapa ahli partisipasi dapat didefinisikan sebagai tindakan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedangkan di dalam Kamus Sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keterlibatan individu dalam kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau sebagai profesinya sendiri. Keterlibatan itu, dilakukan sebagai konsekuensi dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota komunitas lainnya (Aprilia Theresia, 2014:196). Menurut Isbandi, partisipasi merupakan proses mengidentifikasi masalah dan potensi di masyarakat, mengevaluasi perubahan dalam pengembangan dan pemilihan solusi alternatif dalam pembangunan (Isbandi Rukminto, 2007:26)

Masyarakat merupakan indikator vital dalam pembangunan karena bukan hanya pemerintah yang melakukan proses pembangunan akan tetapi harus melibatkan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan desa tidak terbatas pada investasi saja, tetapi yang lebih penting adalah melalui kebijakan pembangunan yang mendorong berkembangnya pembangunan desa yang dilakukan oleh masyarakat (Ginandjar Kartasasmita, 1977: 153). Lebih lanjut Ginandjar menyatakan bahwa masyarakat itu terletak pada komunitas manusia yang kekal dan abadi yang menempati wilayah tertentu, dan memiliki budaya serta terjalin dalam suatu hubungan diatara anggotanya.

Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi terkait kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat, tanpa kehadiran masyarakat program pengembangan dan proyek-proyek pemerintah tidak akan efektif bahkan cenderung akan gagal;
2. Kepercayaan masyarakat terhadap proyek atau program pengembangan meningkat ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam proses perencanaan serta persiapan, karena mereka lebih siap untuk menangani proyek dan merasa terlibat;
3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Masyarakat mempunyai wewenang untuk menyampaikan saran terkait jenis pengembangan yang akan dilakukan di daerah mereka sendiri (Conyers, 1994: 154).

Berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus pembangunan, oleh karena itu maka tingkat partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebab yang mengetahui kebutuhan pembangunan di daerah tersebut ya masyarakat setempat. Pada intinya adalah bagaimana kolaborasi masyarakat dan pemerintah untuk

memberikan bantuan guna meningkatkan, mempelancar, mempercepat dan menjamin keberhasilan dalam pembangunan desa.

Perencanaan suatu program merupakan tugas yang menantang sebab program yang baik adalah keselarasan antara kebutuhan dan masalah dari kelompok sasaran program tersebut, semakin beragam dan komplek kebutuhan dan permasalahan dari kelompok sasaran maka akan semakin rumit penyusunan perencanaan suatu program. Masyarakat mempunyai karakteristik sendiri-sendiri serta memiliki preferensi dan kebutuhan, kemudian kemampuan masyarakat dalam menganalisis situasi yang dihadapi juga beragam, kemampuan dalam mengambil keputusan juga tidak sama antar warga masyarakat (Aziz Muslim, 2009: 119).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan menurut Tjokromidjojo, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah mengenai arahan, strategi dan kebijakan pembangunan;
2. Partisipasi dalam mengasumsikan akuntabilitas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
3. Proses pemilihan dan pemanfaatan pengembangan secara berkeadilan dan keberlanjutan (Tjokomidjojo, 1998: 104).

Menurut Raharjo, anggaran yang tersedia untuk pembangunan terbatas, tetapi program pengembangan yang direncanakan luas. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung implementasi program yang ada di masyarakat. Dengan persiapan program pengembangan secara terarah dan harmonis dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan implementasi program pengembangan secara efektif dan efisien, yang berarti distribusi dan alokasi faktor produksi dapat dilakukan secara optimal (Rahardjo, 2006: 34-35).

Berdasarkan urian permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi terhadap pembangunan desa; 2). Apa saja yang menjadi masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; 3). Serta bagaimana cara mengatasi dari permasalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terkait dengan kaidah serta perundang-undangan dalam sistem peraturan hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokusnya pada kajian-kajian prinsip dasar hukum, aturan hukum serta bagaimana hukum itu diterapkan (Soerjono soekanto, dkk, 2006).

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah 1). Pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu seluruh peraturan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa baik itu Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa serta peraturan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini (Johni Ibrahim, 2007: 300). 2). Pendekatan analisis konsep hukum, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan serta doktrin hukum yang berkembang dalam merujuk prinsip-prinsip hukum yang ada (Mahmud Marzuki, 2024: 134).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa program ini selaras/sesuai dengan konteks sosial-budaya dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia secara efektif (Ulzikri 2020). Untuk memastikan bahwa inisiatif pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah benar-benar bermanfaat untuk masyarakat setempat, oleh karena itu penting untuk melihat kebutuhan masyarakat. Pembangunan

dianggap berhasil ketika seluruh masyarakat dapat menikmati hasinya serta memastikan tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan atau ditinggalkan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa sangat penting mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta perawatan dan memberikan dukungan moral dan materiil. Dukungan materiil dapat dalam bentuk bantuan keuangan atau sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan proyek pembangunan, sementara dukungan moral bisa dalam bentul penerimaan dan dorongan ide dan saran dari masyarakat kepada pemerintah sebagai pemodal. Mayarakat harus aktif berpartisipasi dalam implementasi pembangunan desa dam tidak boleh acuh tak acuh atau tidak tertarik dalam proses kemajuan desa. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus mencakup partisipasi masyarakat sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan maka penting untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Masyarakat harus dilihat sebagai fokus utama pembangunan bukan hanya sebagai obyek, sehingga masyarakat diakui keberadaannya sebagai komponen penting dalam pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain. Ini mengisyaratkan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana dalam suatu pembangunan tetapi juga aktif terlibat dalam perencanaan dan kontrol perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan digerakkan oleh masyarakat. Menurut Ndraha partisipasi dibagai dalam 6 tahapan: a) Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial; b) Partisipasi dalam memberikan perhatian/penyerapan dan memberikan respon terhadap informasi, baik menerima maupun menolak; c) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan; d) Partisipasi dalam implementasi operasi pembangunan; e) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangan hasil pembangunan; f) Partisipasi dalam memulai pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana implementasi pengembangan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Ndraha Taliziduhu, 1987: 103).

Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain tahun 1980 di Jamaica, menyimpulkan bahwa masyarakat akan tergerak dalam partisipasi jika: Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah diketahui atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat; Partisipasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang terlibat; keuntungan yang diperoleh melalui partisipasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat; Selama proses partisipasi, dipastikan bahwa ada kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat cenderung berkurang ketika individu tidak memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan atau tidak memiliki peran yang ditentukan dalam masyarakat (Ndraha Taliziduhu, 1987).

Partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan menurut Adi dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu: (Merry Onibala ,dkk, 2017: 7-10)

a. Tahap Assesment

Keterlibatan masyarakat secara aktif untuk melihat permasalahan lokal serta mengidentifikasi sumber daya alam lokal, sehingga program pembangunan yang disiapkan oleh pemerintah serta kebutuhan masyarakat dapat serasi. Pertisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sangat penting untuk kelancaran pengembangan pembangunan. Teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti pembangunan bukan hanya dimulai selama pertemuan perencanaan atau implementasinya, tetapi dalam hal ini masyarakat seharusnya mengidentifikasi masalah pada saat ini.

b. Tahap Alternatif Program atau Kegiatan

Setelah masyarakat terlibat dalam mengidentifikasi masalah yang ada di daerah tersebut, tahap selanjutnya adalah membantu pemerintah memikirkan masalah dan bagaimana pemerintah dan warga masyarakat dapat mengatasinya dan memikirkan beberapa program alternatif yang diimplementasikan dalam wilayah tersebut. Program yang diterapkan harus berasal dari upaya masyarakat, karena orang -orang yang mengetahui kebutuhan lokal adalah penduduk, dan dari proses mengekstraksi persyaratan penduduk, karena pemerintah

mengimplementasikan program darurat. Misalnya, di daerah jalanan yang menghubungkan antar desa.

c. Tahap pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Pada tahap ini pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan. Partisipasi masyarakat selama fase implementasi ini membutuhkan energi, uang, atau antusiasme. Aspek sosiologis penduduk memiliki dampak kuat pada keberhasilan pembangunan infrastruktur lokal. Pemerintah selalu bertanggung jawab atas partisipasi masyarakat yang sangat rendah yang disebabkan oleh upah yang terlalu sedikit. Ini masuk akal, tetapi mengharapkan masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam implementasi, karena manfaat pembangunan adalah komunitas itu sendiri.

d. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil)

Pada tahap ini masyarakat diharapkan menggunakan pemantauan laporan tentang program, waktu, dan pengembangan lokal. Kebanyakan orang tidak terlalu peduli dengan penilaian bahwa mereka hanya tertarik pada hasil yang dicapai oleh masyarakat. Dana yang digunakan pada tahap ini adalah tahap terpenting dari kotamadya dan pemerintah, karena mereka mengetahui apakah mereka sudah habis atau jika masih ada sisa makanan. Ini dimaksudkan untuk mencegah korupsi dalam implementasi program pembangunan.

Bentuk Partispasi masyarakat dalam pembangunan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang memiliki tujuan mengembangkan swasembada masyarakat yang dapat dipercaya, aspiratif, representatif, dan bertanggung jawab atas masyarakat. Selain itu adalah ketersediaan, mekanisme perencanaan yang sinergis tergantung kebutuhan masyarakat (Usman Matdoan, 2016: 2). Desa siaga juga merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, terutama pada aspek pengkondisian desa untuk melihat permasalahan yang ada, merencanakan dan menyelesaikan masalah mereka sendiri, serta selalu siap dalam menghadapi berbagai masalah terutama kesehatan dan kegawat daruratan (Laksana Nuring, 2013: 1).

2. Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pelibatan pembangunan oleh pemerintah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti usia, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah komunikasi, kepemimpinan dan lamanya tinggal di desa. Penelitian yang dilakukan oleh Suroso terhadap faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelibatan masyarakat dalam pembangunan, di mana pendidikan, usia, komunikasi dan kepemimpinan menunjukkan adanya tingkat pelibatan masyarakat yang berbeda. Pendapatan dan lama tinggal di desa menunjukan tidak ada perbedaan dalam partisipasi pembangunan desa (Suroso Hadi, dkk, 2014: 7-15).

Permasalahan yang timbul akibat implementasi pembangunan desa yang melibatkan masyarakat dan pemerintah sangat banyak dan kompleks. Skripsi Dadang Vickram terkait faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: (Dadang Vikram, 2010: 49-50) (a) Pemerintah desa yang kurang aktif dalam pembinaan masyarakat; (b) Masyarakat tidak aktif dan acuh tak acuh terhadap pembangunan, meraka berasumsi bahwa pambangunan desa adalah tanggungjawab pemerintah; (c) Kurangnya transparasi dalam penggunaan dana proyek pembangunan; (d) Bangunan – bangunan yang dihasilkan tidak memenuhi keinginan serta kebutuhan masyarakat. Bahkan ada pembangunan yang tidak terselesaikan; (e) Sering terjadi salah paham antar warga masyarakat pada saat musyawarah desa (musydes); (f) Sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung menyebabkan kecemburuan sosial antar warga masyarakat; (g) Rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sering tidak sesuai target yang diinginkan karena keterbatasan sumber pendanaan yang terbatas.

Dari faktor penghambat diatas dapat ditarik beberapa inti terkait faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dibedakan

menjadi dua, yaitu: (Suroso hadi, 2014: 10-13).

a. **Faktor Internal**
   1) Usia, partisipasi masyarakat dan usia. Orang yang berusia lebih dari 40 tahun dianggap lebih tinggi tingkat partisipasinya dibandingkan kaum muda alasannya adalah kaum muda merasa enggan terhadap orang yang lebih tua dari dirinya.
   2) Tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tingkat pengetahuan masyarakat mempengaruhi input yang diberikan selama pembahasan pembangunan, tingkat pengetahuan seseorang sangat dipengaruhi oleh pendidikan seseorang.
   3) Jenis pekerjaan masyarakat, pada jenis pekerjaan tertentu akan lebih tinggi tingkat partisipasi dalam pembangunan desa karena mereka akan meluangkan waktu untuk berpartisipasi. Sektor pekerjaan masyarakat yang akan meluangkan waktu adalah pada sektor pertanian, kemudian sektor pekerjaan yang tidak bisa meluangkan waktu adalah jenis pekerjaan industri.
   4) Tingkat penghasilan penduduk, semakin tinggi penghasilan maka partisipasi yang lebih tinggi dalam pembangunan asumsinya adalah mereka tidak lagi mencari tambahan penghasilan. Dalam hal berpartisipasi dalam bentuk materiil.
   5) periode tinggal di wilayah tersebut, semakin lama seseorang tinggal dalam suatu wilayah maka tingkat partisipasi dalam pembangunan desa akan lebih tinggi karena mereka merasa memiliki atau rasa memiliki terhadap lingkungan sangat tinggi. Sehingga mereka lebih aktif dalam pembangunan untuk kemajuan wilayahnya.

b. Faktor Eksternal
   1) Komunikasi, karena komunikasi intensif antar warga masyarakat maupun warga masyarakat dengan pemerintah, antara sistem masyarakat dan sosial sistem eksternal menunjukan bahwa ada komunikasi yang intensif sangat mempengaruhi pelibatan masyarakat dalam pembangunan.
   2) Kepemimpinan, seorang pemimpin harus mempengaruhi dan menghimbau bawahan, terbuka terhadap pandangan baru, menanggapi kebutuhan bawahannya, serta mendukung inovasi yang disampaikan. Selain itu proses pembelajaran dan dampak kegiatan yang terkait dengan tugas warga masyarakat. Kehadiran buku panduan sangat penting untuk mempengaruhi masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam pengembangan desanya.

Asep Nurwanda berpendapat hambatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di desa terdiri dari 5 (lima) dimensi. Dimensi tersebut, yakni: (Asep Nurwanda, 2016: 34-35)

a. Partisipasi pikiran

   Aspek hambatan partisipasi pikiran dari tokoh masyarakat desa dalam pembangunan fisik dapat diketahui bahwa hambatan yang ada karena pelaksanaan rapat musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) terkadang masih harus mempertimbangkan pembangunan jalan yang menjadi skala prioritas.

b. Partisipasi tenaga

   Sebagian besar masyarakat tidak memberikan partisipasi dalam pembangunan fisik, karena masih banyak warga yang tidak hadir karena urusan mereka baik kesibukan maupun ikatan kerja lainnya sehingga masih banyak warga yang kurang berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga.

c. Partisipasi keahlian

   Dalam penunjukan tenaga ahli setempat dalam pembangunan fisik di desa, tidak ditemukan hambatan yang berarti pada aspek penunjukan tenaga ahli Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) dalam pembangunan fisik di Daerah.

d. Partisipasi barang

Pemberian alat kerja manual dalam pembangunan fisik yang ada di Desa, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam memberikan alat kerja manual lebih memilih membawa yang berkualitas kurang.

e. Partisipasi uang

Partisipasi berupa dana melalui ajuan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menunjang kegiatan pembangunan fisik dapat diketahui bahwa tidak ditemukan hambatan yang berarti, kalau masalah non teknis seperti menunggu.

KESIMPULAN

Tingkat partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat dalam 4 tahap yaitu:

a. Tahap Assesment

Warga masyarakat dilibatkan secara aktif untuk melihat permasalahan yang terjadi diwilayah setempat serta mengidentifikasi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh wilayah tersebut, sehingga program pembangunan yang disiapkan oleh pemerintah maupun dari pandangan masyarakat dapat tepat sasaran. Peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam menunjang kelancaran pembangunan desa.

b. Tahap Alternatif Program atau Kegiatan

Setelah Masyarakat ikut terlibat dalam pengidentifikasian masalah yang ada diwilayahnya tahap selanjutnya adalah dengan melibatkan warga masyarakat berpikir tentang cara mengatasi masalah serta memikirkan beberapa alternatif program yang direncanakan akan dilaksanakan di wilayah tersebut. Program yang akan dilaksanakan harus dari aspirasi-aspirasi masyarakat setempat karena yang mengetahui kebutuhan wilayah tersebut adalah warga setempat, dari proses penggalian aspirasi warga maka pemerintah akan melaksanakan program yang mendesak.

c. Tahap pelaksanaan atau kegiatan

Pada tahap ini pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan program yang sebelumnya telah direncanakan agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan. Keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan ini sangat dibutuhkan baik itu tenaga, uang maupun semangat. Aspek sosiologis warga sekitar sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan infrastruktur wilayah tersebut, pemerintah selalu disalahkan karena partisipasi masyarakat sangat rendah yang diakibatkan oleh upah yang terlalu sedikit.

d. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil)

Pada tahap ini masyarakat diharapkan ikut mengawasi laporan kegiatan dari mulai program, waktu maupun dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan diwilayah tersebut. Kebanyakan masyarakat tidak terlalu peduli dengan evaluasi yang mereka pedulikan hanya hasil yang didapatkan oleh masyarakat. Evaluasi merupakan tahap yang paling penting diperhatikan oleh masyarakat maupun pemerintah karena pada tahap ini akan mengetahui dana yang digunakan apakah habis atau masih ada sisa, ini untuk mencegah adanya korupsi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Tingkat pendidikan masyarakat di pedesaan masih sangat rendah, tingkat komunikasi dari pemerintah ke masyarakat kurang sehingga menyebabkan masyarakat kurang paham apa yang disampaikan. Usia, pekerjaan, kepemimpinan dari tokoh masyarakat, penghasilan dan lamanya tinggal didesa mempunyai hubungan dengan keaktifan atau tingkat partisipasi yang tinggi terkait dengan pembangunan di desa.

REFERENSI

[1] Aprilia Thresia, 2014, *"Pembangunan Berbasis Masyarakat"*, Bandung: Alfabeta.

[2] Asep Nurwanda, *"Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa)",* Makalah, 2016.

[3] Aziz Muslim, 2009, *"Metedologi Pengembangan Masyarakat"*, Yogyakarta: Teras Kompleks Gowok Blok D 2 No 186.

[4] Conyers, 1994, *"Perencanaan Sosial (Suatu Pengantar)"*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

[5] Dadang Vickram, *"Problematika Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sebangar kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis"*, Skripsi, 2010.

[6] Ginandjar Kartasasmita, 1977, *"Administrasi Pembangunan"*, Jakarta:Pustaka LP3ES.

[7] Hadi Suroso dkk, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik"*, Jurnal Wacana Vol 17 No 1, 2014.

[8] Isbandi Rukminto Adi, 2007, *"Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan"*, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press.

[9] Johni Ibrahim, 2007, *"Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif"*, Malang: Bayumedia Publishing.

[10] Laksana, Nuring Septyasa, *"Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"*, Jurnal kebijakan dan manajemen publik, 2013.

[11] Mahmud, Peter Marzuki, 2024, *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Kencana

[12] Matdoan, Usman, *"Peranan Program Pnpm-Mandiri Pedesaan Dalam Mendorong Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal"* Biosel: Biology Science and Education, Vol 14 No 3, 2016.

[13] Merry Onibala dkk, *"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Minahasa, Kawangkoan Utara Kabupaten"*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol 2 No 2, 2017.

[14] Ndraha, Taliziduhu, 1987, *"Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas"*, Jakarta: Bina Aksara.

[15] Putra, Candra Kusuma, *"Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)"*, Jurnal Administrasi Publik. Vol 1 No 6, 2013.

[16] Rahardjo Adisasmita, 2006, *"Pembangunan Desa Partisipatif"*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Cetakan Pertama.

[17] Sandra Hasba dan Syahrul, *"Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan: KasusKelurahan Bungguosu Konawe"*, Jurnal Shautut Tarbiyah Ed ke-38 Th. XXIV Mei 2018.

[18] Suroso, Hadi,dkk, *"Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik"*, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17 No 1, 2014.

[19] Tjokromidjojo, B, 1998, *"Perencanaan Pembangunan"*, Jakarta: CV Haji Masagung.

[20] Ulzikri, Ahmad Robi. 2020. "Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis Dalam Kasus Eksploitasi Pasir Di Perairan Krakatau Lampung Selatan)." *Jurnal Public Policy* 6(2):56. doi: 10.35308/jpp.v6i2.1994.